

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tercantum secara tegas dalam Pasal 27, Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dan kewajiban yang sama dalam memperoleh kehidupan yang layak bagi setiap warga negara Indonesia. Dilanjutkan dengan Pasal 28 C tentang: 1) hak pengembangan diri melalui pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan hidupnya dan kesejahteraan umat manusia; 2) hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kemudian Pasal 28 D tentang: 1) hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; dan 3) hak warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jika dibawa dalam ranah kesetaraan *gender* maka dapat diartikan bahwa antara laki-laki dan perempuan harus mendapatkan kesempatan dan akses yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Monica & Fauziah, 2017) tujuannya adalah untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan setara. Hal ini juga didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 (2004) tentang pentingnya strategi Pengarusutamaan *Gender* (PUG) dimana Inpres tersebut berisi tentang tugas yang diberikan kepada Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota untuk melakukan semua proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai evaluasi dan monitoring seluruh kebijakan nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk diintegrasikan dengan PUG.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sampai saat ini belum mampu menghentikan anggapan masyarakat bahwa perempuan adalah orang kedua dalam kehidupan, perempuan selalu dianggap tidak mampu dan terbelakang dalam ranah publik seperti menjadi pimpinan, anggota parlemen dan pemutus kebijakan. Jika berkaca dari perspektif *gender*, perempuan memiliki struktur sosial budaya dan faktor ekonomi yang tertinggal dari laki-laki dalam posisi kepemimpinannya. Hal

ini disebabkan karena landasan untuk mewujudkan hak-hak dasar individu masih rendah, khususnya perempuan, berupa hak-hak sosial lainnya atas pendidikan, kesehatan dan akses terhadap pengetahuan, sumber daya ekonomi dan politik (Fadhli, 2014). Rendahnya akses inilah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan *gender* antara laki-laki dan perempuan, selain itu tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana hasil penelitian dari (Malihah, 2020) bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik dipengaruhi oleh: 1) sistem pemilihan umum dan perekrutan kader partai; 2) kurangnya kemampuan perempuan terjun langsung ke dalam politik praktis; 3) persepsi masyarakat terhadap politik; 4) budaya patriarki dan doktrin agama; 5) ketidakmampuan perempuan dalam menyelesaikan masalah; dan 6) rekonstruksi budaya sosial media. Isu tentang kesetaraan *gender* bukanlah isu yang memiliki cakupan yang kecil melainkan isu yang bersifat global (Hidayati & Mardhiah, 2018). Selain memiliki cakupan yang luas, isu *gender* juga masuk dalam setiap sendi kehidupan masyarakat (Puspandari et al., 2019) bahkan dalam dunia pendidikan (Sahri & Hidayah, 2020). Selain itu, Salah satu faktor utama ketidaksetaraan *gender* ini terjadi adalah budaya patriarki yang sudah berkembang dan sudah mendarah daging di dalam kehidupan masyarakat sehingga menganggap bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan (Werdiningsih, 2020).

Perempuan dalam konstruksi sosial masyarakat seringkali dianggap “kurang mampu” dalam mengambil keputusan dikarenakan dominasi emosional lebih besar daripada rasionalnya (Astuti, 2008). Karena dominasi emosional daripada rasional inilah sehingga dalam dunia Sosiologi, perempuan terkadang tidak terlalu diperhatikan dan terabaikan (Hunawa, 2018). Hal ini tentunya keliru apabila kita berkaca dari pendapatnya Oakley (Jackson and Jones, 2009) bahwa peran seorang perempuan dan laki-laki itu dibentuk secara sosial dalam arti sikap mengambil keputusan, memimpin dalam suatu lembaga atau pemerintahan dapat dibentuk dan diciptakan bukan secara biologis melainkan secara sosial, kultural, dan psikologis tentunya dalam masyarakat dan kurun waktu tertentu.

Tetapi pada kenyataannya jika dilihat dari hasil penelitian (*world bank*) dengan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah public seperti pemerintahan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal senada

juga dilansir oleh Republika.co.id (2022) bahwa Bank Dunia mencatat pendapatan *startup* juga lebih tinggi ketika dipimpin oleh seorang perempuan, dimana pendapatan kumulatif naik sebesar 10% dalam 5 tahun serta memiliki kinerja yang lebih baik. Studi dunia lainnya menemukan bahwa perusahaan yang menggunakan direktur utama (*chief executive officer/CEO*) & direktur keuangan (*chief financial officer/CFO*) perempuan membentuk laba berlebih & kinerja harga saham yg lebih baik. Kemudian yang terjadi di salah satu desa di Nusa Tenggara Barat (NTB) tepatnya di Desa Sesaot Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan penelitian pendahuluan bahwa pertumbuhan ekonomi di Desa tersebut setelah dipimpin oleh seorang perempuan mengalami kenaikan yang signifikan dimana sebelum dipimpin oleh seorang perempuan, pendapatan ekonomi di desa tersebut sekitar 200-300 juta per tahun. Namun setelah dipimpin oleh seorang perempuan, pendapatan di desa tersebut mengalami kenaikan sebesar 1-3 miliar per tahun.

Selain itu, pertama dalam sejarah pemerintahan Desa Sesaot dipimpin oleh seorang perempuan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat laki-laki maupun perempuan dengan sistem demokrasi selama dua periode, adapun kepala Desa Sesaot dari periode pertama sampai saat ini sebagai berikut: Periode I Tahun 1969-1994 (Muhammad Tajudin/ Laki-laki), Periode II Tahun 1995-2001 (H. Jumadil Awal/ Laki-laki), Periode III Tahun 2002-2007 (M. Ishak/Laki-laki), Periode IV Tahun 2008-2013 (Sudiah. S.H/Laki-laki), Periode V Tahun 2013-2019 (Yuni Hari Seni, S. Pd/ Perempuan), dan Periode VI Tahun 2019-2025 (Yuni Hari Seni, S. Pd/ Perempuan). Kemudian dengan dipimpinnya Desa Sesaot oleh seorang perempuan, menciptakan sebuah kesetaraan kerja antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat pada perangkat desa, dimana mulai dari Kepala desa, KASI, dan KAUR Desa Sesaot dibagi rata 50%:50% antara laki-laki dan perempuan. Hal ini membuktikan bahwa seorang perempuan tidak bisa lagi dipandang dengan “sebelah mata”, artinya bahwa perempuan memiliki andil yang sangat besar dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan terpilihnya kembali seorang perempuan menjadi kepala desa dan kemampuan dalam memberikan sebuah kesetaraan dalam pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan.

Berbagai kajian mengenai partisipasi perempuan dalam politik telah dilakukan. Penelitian Arowolo & Aluko (2010) penelitian ini menemukan bahwa

banyak responden wanita percaya bahwa politik akan menghalangi mereka untuk mengurus keluarga secara mutlak. Ketakutan akan keluarga yang berantakan, membesarkan anak-anak yang tidak bertanggung jawab dan kebutuhan untuk melakukan aktivitas rumah tangga mereka diidentifikasi sebagai alasan utama yang mencegah mereka terjun ke dunia politik. Isu kekerasan, premanisme, intimidasi dan politik uang dianggap sekunder. Masalah utama pertama adalah kurangnya minat yang timbul dari kebutuhan untuk secara efektif menangani aktivitas menetap mereka. Kollo (2017) menunjukkan rendahnya partisipasi perempuan dalam politik dikarenakan besarnya pengaruh budaya patriarki sehingga menghambat dan membuat perempuan kurang percaya diri untuk berpartisipasi dalam politik. Penelitian Suciptaningsih (2010) rendahnya partisipasi perempuan dalam politik dikarenakan banyaknya kendala yang menghambat perempuan untuk maju dalam lembaga legislatif, diantaranya kendala psikologis, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Penelitian dari Malihah (2011) menunjukkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik langsung (menjadi kader partai, anggota parlemen, dan pemutus kebijakan politik) dipengaruhi oleh berbagai faktor, sistem pemilihan umum dan perekrutan kader partai, ketidakmauan perempuan terjun langsung ke dunia politik praktis, masih ada anggapan keliru (persepsi masyarakat terhadap dunia politik), faktor budaya patriarki dan doktrin agama, serta ketidakmampuan perempuan mengatasi masalah, faktor lain yang mempengaruhi adalah rekonstruksi sosial budaya media. Kemudian Penelitian dari Saputra, dkk (2020) menunjukkan bahwa minimnya pendidikan wanita terhadap politik, kaderisasi partai politik, persoalan izin dari pasangan, modal finansial, keturunan tokoh politik, kepercayaan dan budaya patriarki yang masih kental merupakan penghambat dari partisipasi perempuan dalam politik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi perempuan dalam politik dipengaruhi oleh 2 faktor besar yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa kondisi psikologi dari seorang perempuan, kemauan dan persepsi dari seorang perempuan tentang dunia politik, dan tingkat pendidikan. Sedangkan faktor eksternalnya berupa kentalnya budaya patriarki, kondisi ekonomi, politik, agama, sosial dan budaya.

Selain itu, Politik dan perempuan adalah topik yang melibatkan peran dan partisipasi perempuan dalam konteks politik. Berikut adalah beberapa temuan dari

hasil penelitian terkait politik dan perempuan: 1) Penguatan Identitas Politik Perempuan dalam Masyarakat Adat Kajang (Wirahman & Alfiyani, 2022) Penelitian ini membahas upaya penguatan identitas politik perempuan dalam masyarakat adat Kajang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam masyarakat adat Kajang memiliki posisi penting sebagai perwakilan perempuan dalam kelembagaan masyarakat adat Kajang; 2) Politik Perempuan Perspektif Al-Qur'an (Suhenty, 2022) Penelitian ini membandingkan pandangan Ibnu Katsir dan Quraish Shihab terhadap ayat-ayat politik perempuan dalam Al-Qur'an. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan membandingkan penafsiran keduanya terhadap ayat-ayat politik perempuan; 3) Pengaruh Budaya Patriarki pada Peran Politik Perempuan (Kasim, dkk, 2022) Penelitian ini meneliti pengaruh budaya patriarki terhadap peran politik perempuan dan pengambilan kebijakan publik di parlemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran politik perempuan di parlemen masih rendah, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti budaya politik patriarki dan pandangan stereotip terhadap perempuan dalam politik; 4) Potret Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen dan Faktor-Faktor Penghambatnya (Suhri, 2022) Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterwakilan politik perempuan di parlemen dan faktor-faktor yang menghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan politik perempuan di parlemen masih rendah, dan faktor-faktor seperti budaya patriarki dan peran ganda perempuan menjadi penghambatnya; 5) Relevansi Partisipasi Politik Perempuan dan Keterpilihan Perempuan dalam Pilkada Serentak 2020 (Hafiza, Widayati, & Ulhaq, 2022) Penelitian ini mengeksplorasi partisipasi politik perempuan dalam Pilkada 2020 dan hubungannya dengan keterpilihan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan mengalami peningkatan, namun tingkat keterpilihan perempuan masih rendah; 6) Eksistensi Politik Perempuan Pasca Kemerdekaan Indonesia (Kaltsum, A. Kambo, & Muhammad, 2022) Penelitian ini membahas eksistensi politik perempuan pasca kemerdekaan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan politik perempuan sangat penting dalam pembangunan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, dan perempuan memiliki peran dalam mempengaruhi arah kebijakan negara.

Dari temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran dan partisipasi perempuan dalam politik masih menjadi isu yang relevan dan perlu diperhatikan. Faktor-faktor seperti budaya patriarki, pandangan stereotip, dan peran ganda perempuan dapat menjadi penghambat dalam keterwakilan politik perempuan. Upaya penguatan identitas politik perempuan dan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik perlu terus didorong untuk mencapai kesetaraan *gender* dalam arena politik.

Berdasarkan berbagai kajian di atas, sebagian besar membahas dan meneliti terkait permasalahan yang menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam politik. Belum ada yang membahas bagaimana seorang perempuan ketika terjun dalam dunia politik dan berperan sebagai pemangku kebijakan. Padahal, peneliti merasa penelitian ini sangat dibutuhkan untuk memberikan wacana bahwa perempuan memiliki kemampuan dan kompetensi yang mumpuni bahkan lebih daripada laki-laki dalam menduduki jabatan strategis. Melihat realitas saat ini bahwa akses dalam memasuki dunia politik sudah terbuka antara laki-laki dan perempuan, khusus di Indonesia juga telah diatur dalam undang-undang terkait tentang kuota/keterwakilan perempuan dalam politik sebesar 30%, walaupun memang dalam implementasinya masih belum maksimal dikarenakan kurang pahalannya dan ketatnya persaingan dalam menduduki jabatan dalam politik (Mukarom, 2007).

Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi untuk melengkapi dan menyempurnakan kajian sebelumnya tentang partisipasi perempuan dalam politik, akan tetapi dari sudut pandang yang berbeda sebagai bentuk keterbaharuan (*novelty*) yaitu bukan pada faktor yang menghambat partisipasi perempuan dalam politik, melainkan pada peran dan kebijakan perempuan dalam politik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu merekonstruksi dan mengikis sedikit demi sedikit pemahaman yang selama ini melekat pada masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan itu hanya bisa bergerak di wilayah domestik. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai “Partisipasi Perempuan dalam Politik di Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan fokus, maka rumusan masalah secara umumnya adalah; “Bagaimana Partisipasi Perempuan dalam Politik di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat?”.

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini, maka peneliti membuat ke dalam beberapa pertanyaan penelitian yang lebih khusus sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam politik di Desa Sesaot?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat perempuan dalam politik di Desa Sesaot?
- c. Bagaimana peranan perempuan dalam politik di Desa Sesaot?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana partisipasi dan peranan perempuan dalam politik serta faktor pendukung dan penghambatnya. Dari tujuan umum tersebut kemudian peneliti merumuskan menjadi beberapa tujuan khusus untuk lebih memfokuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Memahami dan mendeskripsikan pandangan masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam politik di Desa Sesaot.
- b. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat perempuan dalam politik di Desa Sesaot.
- c. Menganalisis dan mendeskripsikan peranan perempuan dalam politik di Desa Sesaot.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis penelitian ini adalah mampu memberikan wawasan dan pelengkap wacana yang selama ini di bangun terkait partisipasi perempuan dalam

politik. Lembaga pemerintahan diharapkan mampu memberikan kesempatan seorang perempuan untuk terlibat bukan hanya dilibatkan dalam mengambil kebijakan politik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang serta dapat memperkaya bahan kajian ilmu pengetahuan sosial terutama pada kajian *gender* dan politik.

Manfaat secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung:

- a. Bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan rujukan terhadap kajian perempuan, *gender* dan politik yang dapat dikaji berdasarkan Sosiologi *Gender* maupun Sosiologi Politik. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam pengembangan kajian Pendidikan Sosiologi
- b. Bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai wahana untuk menambah ilmu pengetahuan serta konsep *gender* dan politik.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini menjadi sumbangan pengetahuan lain untuk dapat dikembangkan mengenai partisipasi perempuan dalam politik.
- d. Bagi masyarakat, memberikan pemahaman tentang pentingnya memberikan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat di dalam ranah public.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Struktur organisasi tesis ini berisi rincian mengenai urutan penelitian dari setiap bab dan bagian demi bagian dalam tesis. Tesis ini terdiri dari lima bab yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan: merupakan bagian awal dari tesis yang berisi enam bagian, yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.
2. Bab II Kajian Pustaka: bab ini berkaitan dengan teori-teori mengenai masalah yang sedang diteliti melalui sumber-sumber yang digunakan seperti buku, jurnal, tesis/disertasi, serta literatur resmi lainnya. Kajian pustaka berisi

mengenai tinjauan umum tentang misinformasi, teori konfirmasi, serta lembaga pendidikan.

3. Bab III Metode Penelitian: berisi penjabaran mengenai metode penelitian dan komponen lainnya, seperti lokasi dan subjek penelitian, pendekatan dan metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
4. Bab IV Temuan dan Pembahasan: merupakan bab yang memaparkan temuan penelitian dan pembahasan. Bab ini terdiri dari dua hal utama, yakni deskripsi temuan penelitian dan pembahasan.
5. Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi: merupakan bab penutup yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan penulis terhadap hasil analisis temuan penelitian. Bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu simpulan dan saran.